

# Kejaksanaan Usut Dana Jamkesmas Takalar

"Ini uang negara. Harus jelas ke mana uang itu," ujar Jen.

**TAKALAR** — Kejaksanaan Negeri Takalar segera memeriksa sejumlah pihak yang terlibat kasus dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Menurut Kepala Kejaksanaan Negeri Takalar Hermanto, rencana pemeriksaan dijadwalkan pekan depan. "Bukan hanya direktur rumah sakit yang akan diperiksa, tapi juga orang yang diduga terlibat," katanya saat dihubungi kemarin.

Hermanto menjelaskan, pemeriksaan akan dilakukan setelah tim investigasi Kejaksanaan merampungkan pengumpulan data dan bahan Jamkesmas. "Nantilah kita lihat hasil investigasi tim."

Kasus ini bermula dari utang obat Rumah Sakit Umum Daerah Pajonga Daeng Ngalle sebesar Rp 810 juta. Utang itu rencananya dibayarkan melalui dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp 448 juta dan Jamkesmas sebesar Rp 2,6 miliar. Dana itu sebenarnya untuk pelayanan rumah sakit dan warga miskin. Namun dana tersebut tetap digunakan untuk pembayaran utang, pembelian obat, dan biaya operasional rumah sakit. Kejaksanaan mengendus adanya dugaan kejanggalan pada dana itu.

Hasil sementara tim investigasi, dia melanjutkan, sudah menunjukkan langkah awal untuk dilakukan pemeriksaan. Pengumpulan data-data itu akan disimpulkan hari ini. Setelah disimpulkan, Kejaksanaan langsung menerbitkan surat pemeriksaan. "Mereka yang akan diperiksa tentunya mengetahui ke mana dana itu dialirkan," ujar Hermanto.

Adapun Direktur Rumah Sakit

Pajonga, Syarifuddin, menyatakan bersedia diperiksa. Lagi pula, dia menilai, dana Jamkesmas tersebut bukan tanggung jawabnya. Dia menuturkan, pengucuran dana sebesar Rp 2,6 miliar dan Rp 448 juta itu diterima direktur lama, Hidayati Sannusi.

Dana itu, dia melanjutkan, untuk pembayaran utang, pembelian obat, dan biaya operasional rumah sakit.

"Berarti yang bertanggung jawab adalah direktur lama, bukan saya," ujarnya.

Perihal utang obat, Syarifuddin memang meminta pemerintah Takalar melunasinya. Sebab, menurut dia, rumah sakit merupakan aset pemerintah daerah. Karena itu, persoalan di rumah sakit menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "Kami tak ingin membiarkan pelayan

rumah sakit memburuk karena kurangnya stok obat," katanya.

Sekretaris Daerah Takalar Andi Muhammad Jen Syarif Rifai berjanji pihaknya akan membayar utang sebesar 810 juta itu. Tapi pembayarannya menunggu anggaran perubahan. "Jangan takut, pasti ditanggung," kata Jen.

Kendati begitu, dengan dibayarnya utang ini, bukan berarti proses

pengusutan dihentikan. Pengusutan dana kesehatan gratis tersebut tetap berjalan. "Ini menyangkut uang negara. Harus jelas ke mana uang itu," ujar Jen.

Selain itu, dia melakukan evaluasi serta memperbaiki sistem manajemen dan pelayanan rumah sakit. "Pelayanan harus diutamakan. Apalagi masyarakat miskin."

● SAHRUL



FAHMI ALI (TEMPO)

## Kunjungi Kapal Perang

Para siswa SMA Hang Tuah Makassar saat berkunjung ke kapal tempur KRI Sultan Hasanuddin di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, kemarin. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap dunia maritim sejak dini.

## Tersangka yang Bentrok di Kejaksanaan Ditahan

**MAKASSAR** — Kepolisian Resor Makassar menahan dua aktivis Gerakan Mahasiswa Anti-Korupsi (Germak) Sulawesi Selatan. Keduanya adalah Dewan Pembina Germak Azhari Setiawan alias Kamacappi dan anggotanya, Rustam.

Mereka ditahan dalam kaitan dengan bentrok yang terjadi di halaman kantor Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat pada Selasa pekan lalu. Saat itu terjadi unjuk rasa. "Mereka terbukti mengeroyok jaksa saat berunjuk rasa," ujar Kepala Polres Makassar Komisaris Besar Muhammad Nur Samsul kemarin.

Kedua tersangka ditahan sejak Rabu malam lalu, setelah diperiksa hampir sembilan jam. Bukti keterlibatan mereka, Nur Samsul mengatakan, berdasarkan pengakuan korban dan beberapa saksi dari Kejaksanaan. Selain itu, polisi mengaku mempunyai rekaman. "Kami tak akan menahan seseorang jika bukti tidak lengkap," kata perwira menengah tersebut.

Bentrok terjadi saat sekelompok aktivis Germak berdemo di Kejaksanaan. Mereka mendesak Kejaksanaan mengusut kasus dugaan

korupsi pembangunan jalan di Soppeng. Germak menemukan indikasi kerugian negara senilai Rp 1,7 miliar. Dana itu dikucurkan Dinas Pra-

sarana Wilayah Sulawesi Selatan.

Pemicu bentrok adalah saat sejumlah staf dan jaksa hendak memadamkan api yang membakar ban

bekas oleh demonstran di depan pintu kantor Kejaksanaan. Tindakan itu mendapat perlawanan hingga bentrok tak bisa dihindari. Akibatnya, dua staf Kejaksanaan, yakni Qadri, 31 tahun, dan Andi Zulfikar, 25 tahun, mengalami luka-luka. "Tersangka dikenai Pasal 170 tentang Pengeroyokan, dengan ancaman di atas lima tahun penjara," kata Nur Samsul.

Sementara itu, Kamacappi terlibat dalam insiden tersebut. Dia mengaku tidak berada di lokasi saat bentrok terjadi. Dia datang setelah insiden itu. "Saya malah yang menenangkan dan meminta teman-teman mundur agar bentrok tidak meluas," kata Kamacappi di sel tahanan kemarin.

Polisi, menurut Kamacappi, gegabah menahan dirinya. Dia menilai penahanan itu bermuatan politis lantaran dia tidak terlibat langsung. Karena itu, Kamacappi menolak menekan berita acara pemeriksaan dan surat penahanan.

● ABDUL RAHMAN

## 4 Bulan Bebas, Kamacappi Masuk Hotel Prodeo Lagi

**G**erakan Mahasiswa Anti-Korupsi (Germak) berkaitan dengan nama Azhari Setiawan, yang lebih akrab disebut Kamacappi. Dia dianggap sebagai pentolan aktivis Germak setiap kali menggelar unjuk rasa di Makassar.

Kamacappi pada Rabu malam lalu ditahan gara-gara terlibat bentrok di Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat, Selasa pekan lalu. Tapi bukan kali ini saja mahasiswa program pascasarjana di Universitas 45 itu berurusan dengan hamba wet.

Kiprah Kamacappi pada gerakan mahasiswa sudah dikenal oleh masyarakat Makassar. Dia sempat dituding menjadi dalang kerusuhan antara polisi dan aktivis Himpunan Ma-

hasiswa Islam Makassar.

Kamacappi juga pernah ditangkap polisi pada Maret lalu dengan tuduhan sebagai pemicu bentrok. Tapi, belakangan, polisi beralih penangkapan itu berkaitan dengan kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam catatan kepolisian, Kamacappi dikenal sebagai residivis pencurian sepeda motor. "Itu masa lalu. Saya akui itu. Tapi setelah *concern* pada pemberantasan korupsi bersama Germak, saya berhenti melakukan itu," ujarnya kemarin.

Kamacappi baru empat bulan lepas dari penjara Kelas I Makassar. Dia ditahan dengan tuduhan pencurian sepeda motor. Hakim Pengadilan Negeri Makassar memvonisnya em-

pat bulan penjara pada Juni lalu. Tapi Kamacappi hanya menjalani vonis itu selama sepuluh hari. Sebab, terdakwa sudah menjalani hukuman selama tiga bulan lebih.

Berkaitan dengan sejumlah unjuk rasa selama ini, Kamacappi mengaku hal itu murni pergerakan idealisme. Germak mempunyai penyandang dana dari luar negeri. Selain itu, dia mengaku mempunyai usaha sendiri. Kamacappi memiliki kapal yang disewakan kepada nelayan. Dari situlah anggaran yang didapatkan digunakan untuk melakukan aksi. "Teman-teman kan butuh anggaran untuk demo. Dan itu saya tanggung semua," ujarnya. "Biar uangnya kecil, yang penting usaha saya sendiri." ● ABDUL RAHMAN